

TERDUGA PENGANIAYA DARSO

Enam Polisi Disanksi Patsus

SLEMAN (KR) - Enam anggota Polresta Yogyakarta yang diduga terlibat dalam kasus kematian Darso (43), warga Semarang Jawa Tengah dikenai sanksi penempatan khusus (patsus) di Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama 30 hari.

Penjatuhan sanksi tersebut karena enam polisi itu diduga melanggar prosedur operasi standar (SOP) dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang melibatkan Darso.

"Sudah seminggu yang lalu keenam terduga pelanggaran kode etik ini telah kita laksanakan penempatan di tempat khusus di Polda DIY. Tentunya sudah dibebaskan dari tugas karena kami tempatkan di tempat khusus selama 30 hari," ungkap Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Ihsan di Mapolda DIY, Kamis (23/1).

Ihsan menuturkan bahwa terhadap enam anggota Polresta Yogyakarta itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DIY berfokus memeriksa prosedur dalam penanganan laka lintas pada 12 Juli 2024 yang melibatkan

Darso. "Memang hasil dari pemeriksaan di Bid Propam Polda DIY ditemukan adanya pelanggaran etik yang saat ini sudah berproses untuk etiknya karena diduga melakukan pelanggaran terkait SOP dalam hal penanganan laka lintas," ujarnya.

Meski demikian, Kombes Ihsan menegaskan bahwa terkait dugaan keterlibatan enam anggota Polresta Yogyakarta dalam kasus kematian Darso sepenuhnya ditangani oleh penyidik Polda Jawa Tengah. Enam anggota Satlantas Polresta Yogyakarta tersebut telah memenuhi panggilan penyidik Polda Jateng sebagai saksi.

"Kemarin memang sudah ada panggilan dari penyidik Polda Jateng. Hari ini kalau tidak salah sudah kita berangkatkan anggota untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan panggilan sebagai

saksi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus laka yang terjadi pada 12 Juli 2024 melibatkan pengendara sepeda motor bernama Tutik Wiyanti dengan mobil yang dikemudikan Darso di Jalan Mas Suharto Danurejan Kota Yogyakarta. Di hari yang sama, kecelakaan berikutnya terjadi ketika Restu Yosepta Gerimona, suami Tutik, berusaha mengejar mobil yang ditunggangi Darso beserta dua rekannya.

Berebekal identitas KTP Darso yang sempat difoto oleh keluarga korban, enam orang dari Tim Unit Gakkum Satlantas Polresta Yogyakarta melakukan penjemputan terhadap Darso di Semarang pada 21 September 2024 untuk penyelidikan terkait kecelakaan lalu lintas itu. Pada 10 Januari 2025, keluarga Darso melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogya-karta ke Polda Jawa Tengah atas dugaan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Darso meninggal dunia, setelah beberapa hari sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. **(Ant/Has)-f**

PENGUSULAN RUU MINERBA

Masukan Masyarakat Sudah Penuh

JAKARTA (KR) - Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan, pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang bakal memperluas kategori pengelola tambang, sudah penuh dengan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut Bob Hasan, Badan Legislasi sudah mendengar pendapat dari organisasi kemasyarakatan (ormas), ormas keagamaan, perguruan tinggi, hingga badan usaha. Berbagai aspirasi tersebut, ditampung untuk dibahasakan ke depan.

"Ini baru tahap penyusunan, kemarin penyepakatan jadi inisiatif di Baleg. Nanti pembahasannya, belum," kata Bob di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1).

Ia menilai, tak ada masalah jika pengusulan RUU tersebut hingga disetujui di Rapat Paripurna, dilaksanakan dalam waktu singkat. Pasalnya, RUU Minerba harus disegerakan, karena pemerintah memiliki program hilirisasi. "Ada tahapannya kita *nggak* main langsung, ada tahapan semuanya. Termasuk yang terpenting partisipasi publik ini kita sukseskan untuk menyerap aspirasi dan untuk bekal dalam pembahasan nanti," jelasnya.

pasi publik ini kita sukseskan untuk menyerap aspirasi dan untuk bekal dalam pembahasan nanti," jelasnya.

DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, kemarin. Selain itu, ia juga tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menolak untuk menerima izin pengelolaan tambang.

Menurut Bob, RUU tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan pengelolaan tambang, khususnya bagi perguruan tinggi yang bisa membantu meneliti dan menganalisis. "Sekarang kan banyak tambang batu bara, masyarakat hanya menikmati debu. Sekarang bisa koperasi per-orangan, boleh jadi putra daerah. Disuntik modalnya agar maju," katanya. Namun, ia menyebutkan, UU tersebut hanya merupakan dasar hukum semata. Sedangkan aturan turunannya terkait pelaksanaan pengelolaan tambang diatur oleh Peraturan Pemerintah. **(Ant)-f**

TERKAIT KASUS HARUN MASIKU

Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur Jakarta Pusat. Pengegeledahan tersebut terkait kasus buronan Harun Masiku.

Kamis (23/1), para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil. Penyidik juga membawa barang bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

Menurut informasi yang didapat di lapangan, KPK mulai melakukan pengege-

ledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam. Tim penyidik KPK mengegeledah rumah Djan Faridz (DF) terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM). "Benar, pada giat pengegeledahan perkara tersangka HM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Namun Tessa belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses pengegeledahan masih berlangsung. "Kami belum menerima informasi detail soal alamat rumah yang digeledah. Namun benar bahwa rumah tersebut adalah milik seseorang berinisial DF," ujarnya. **(Ant/Has)-f**

longan, namun korban tidak berdaya dan tak ada bantuan datang. Korban terjatuh ke lantai dan pelaku langsung melakukan aksi kejutnya lalu pergi. Korban menceritakan kejadian yang dialami kepada kakak korban dan disarankan untuk periksa ke RSUD Wates, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Pengasih.

"Petugas melakukan penyelidikan dan diperoleh beberapa alat bukti yang dapat mengidentifikasi identitas pelaku. Petugas mengamankan pelaku di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Korban mengenal pelaku karena sering berburu hewan di sekitar rumah korban yang tinggal seorang diri," katanya. Modus pelaku penasaran dan bernafsu dengan korban, kemudian dengan ancaman kekerasan pelaku merudapaksa korban. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 6 b Undang-undang RI No 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual subsider Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. **(Dan)-f**

OPTIMALKAN SUMBER AIR MELIMPAH

Girikerto Kembangkan Usaha Air dalam Kemasan

YOGYA (KR) - Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dengan didukung penuh dana keistimewaan (danais) berhasil memaksimalkan potensi alam yang dimiliki berupa air yang melimpah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Setelah berhasil membangun Stasiun Pengisian Tangki Air (SPTA) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Girikerto, kini Kalurahan Girikerto berhasil mengembangkan usahanya dengan membangun pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) juga dengan dukungan penuh danais.

Lurah Girikerto Sudibya SPD menuturkan, ide pembangunan pabrik AMDK ini merujuk pada visi misi Gubernur DIY Sultan HB X yang kemudian ditindaklanjuti dengan visi misi Lurah Girikerto, yang pada prinsipnya bagaimana memberdayakan potensi alam yang dimiliki kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setelah dibuat masterplannya serta mendapat arahan dan bimbingan dari Paniradya Kaistimewan DIY dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY, maka disetujui pembangunan pabrik AMDK yang saat ini sudah selesai pembangunannya dan siap berproduksi," terangnya dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Mata Air Girikerto: Sumber Kehidupan dan Kesejahteraan'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (23/1) dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Kegiatan podcast ini didanai danais.

Rembag Kaistimewan



KR-Wawan Isnawan

Rembag Kaistimewan 'Mata Air Girikerto: Sumber Kehidupan dan Kesejahteraan'.

menghadirkan narasumber lain, Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Ir Srie Nurkysatiwi MMA (Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY) dan Rudi Pramoko SPD (Sekretaris Bumkal Gerbang Merapi Girikerto) dipandu *host* Wijil Rachmadani dan *co-host* Pak Radji. Acara dimeriahkan *special performance* Sanggar Teras Seni dan Bung Beh Trinowulung.

Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Podcast Rembag Kaistimewan bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewan dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya.

Menurut Sudibya, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kalurahan Girikerto dengan keberadaan pabrik AMDK ini. Selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Girikerto, membuka lapangan kerja, juga memberikan peningkatan pendapatan asli kalurahan. "Prosesnya memang tidak mudah karena perlu perhitungan mendetail. Jangan sampai produknya mengecewakan konsumen. Bulan depan kami coba produksi AMDK tapi masih untuk kalangan sendiri," katanya.

Rudi Pramoko menjelaskan terkait teknologi dan metode dalam memanfaatkan

sumber air yang melimpah di Kalurahan Girikerto menjadi AMDK. Menurutnya, metode pertama yang digunakan dalam pembuatan AMDK yakni metode filterisasi untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang terkandung dalam air. Setelah itu, air masuk dalam proses penyaringan air atau disebut ozonisasi. Dan sebelum masuk dalam proses pengemasan, ada proses UV untuk sekali lagi menghilangkan kuman dan bakteri.

"Dalam proses ini kami melibatkan tenaga ahli, karena berurusan dengan produk makanan dan minuman kami tidak bisa seandainya memproduksi, tapi harus sesuai SOP dengan melibatkan tenaga ahli. Adapun produk jadinya berupa air mineral dalam galon, air mineral gelas dan air mineral botol," katanya.

Aris Eko Nugroho mengatakan, Kalurahan Girikerto termasuk dalam 10 kalurahan pertama di DIY yang mendapat bantuan BKK Danais pada tahun 2021. Kalurahan Girikerto terus berkembang dalam mengoptimalkan sumber daya alamnya (sumber air melimpah) dengan dukungan danais, yaitu membangun pabrik AMDK yang selesai dibangun tahun 2024. "Tahun 2025 ini harapan kami pabrik AMDK ini sudah operasional," harapnya.

Aris berpesan agar sumber air di Kalurahan Girikerto terus dijaga kelestariannya sesuai dengan konsep Hamemayu Hayuning Bawana dari Ngarsa Dalem (Sultan HB X). "Kondisi alam harus terus dijaga jangan sampai rusak dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Air di sini kami melihat merupakan sumber kehidupan, dan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Kalurahan Girikerto," ujarnya.

Sementara itu, Srie Nurkysatiwi berpesan agar kegiatan produksi AMDK di Kalurahan Girikerto ini bisa tepat, tepat programnya, tepat sarannya dan tepat tatakala/waktunya. Maka Kalurahan Girikerto harus melihat terkait sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kelembagaannya, regulasinya dan bagaimana partisipasi masyarakat setempat.

Dinas Koperasi dan UKM DIY punya fungsi dalam hal pembinaan dan pendampingan bersama-sama Paniradya Kaistimewan DIY, juga bersama lurah dan Bumkal Girikerto.

"Tapi dengan komitmen yang kuat dari Pak Lurah dan teman-teman di Girikerto, saya yakin usaha pabrik AMDK ini bisa terus berjalan dengan baik. Yang penting kuncinya adalah komitmen dan komunikasi," katanya. **(Dev/Wan)**

KKP Targetkan Sambungan hal 1

Selain investigasi, ia juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, kasus pagar laut menggelitik Koordinator Masyarakat Anti-korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi terkait dengan

penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) pagar laut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laut, kata Boyamin, tidak dapat disertifikatkan, sehingga ia menduga ada tindak pidana korupsi dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut.

"Karena itu saya melaporkan ke KPK dengan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu UU No 20 Tahun 2001," kata Boyamin di

Gedung Merah Putih KPK.

Mengenai Pasal 9 UU No 20 Tahun 2001 itu mengatur tentang pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, jelas Boyamin, laporannya dibuat sesuai pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, yang menyebut ada cacat formil dalam penerbitan sertifikat tersebut. **(Ful)-f**

Korban Sambungan hal 1

Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan. "Saya sudah tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi," ujar Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Presiden menginstruksikan agar BNPB membantu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir dan longsor tersebut yang mengakibatkan korban jiwa. "Saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa," ucap

Kepala Negara.

Prabowo juga menegaskan, akan terus memantau perkembangan penanganan bencana alam di Jateng tersebut.

Hujan dengan durasi panjang mengguyur berbagai wilayah di Jateng sejak Senin (20/1) malam hingga Selasa (21/1), mengakibatkan bencana alam longsor dan banjir di sejumlah wilayah. Antara lain banjir di Kabupaten Grobogan dan Demak, serta tanah longsor di Kabupaten Pekalongan.

Satuan Brimob Polda Jawa Tengah dikerahkan membantu proses evakuasi korban bencana alam di beberapa kabupaten di Jateng. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi daerah Pantura Demak, Grobogan, Kendal hingga Pekalongan. "Satbrimobda Jateng bergerak serentak membantu proses evakuasi korban dan penanganan bencana alam

yang terjadi di beberapa wilayah di Jateng," ungkap Wakil Komandan Korps Brimob (Wadankorbrimob) Polri Irjen Pol Ramdani Hidayat.

Ramdani menjelaskan, 50 personel diturunkan membantu proses evakuasi korban banjir akibat tanggul Sungai Pencongan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Sementara 152 personel membantu proses evakuasi korban bencana longsor di Desa Kesimpar, Petungkriyono, Pekalongan. "Mereka bersama stakeholders terkait bersama-sama membangun tanggul sementara dari pasir yang dimasukkan ke dalam karung," jelasnya.

Dalam proses pencarian korban longsor dengan memanfaatkan anjing pelacak, ujarnya, kembali berhasil ditemukan jenazah, di antaranya bayi berusia 5 bulan. **(Cry/Ant)-d**

Anggaran Sambungan hal 1

tentunya ribuan gedung sekolah dapat dibangun. Bila diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan bendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tentunya dapat menghasilkan ribuan sarjana dan memberikan kontribusi kenaikan angka partisipasi sekolah di Indonesia.

Ada tiga kriteria angggaran yang diperbolehkan dan didorong penggunaannya, anggaran dikeluarkan untuk penciptaan lapangan kerja dan produktivitas ekonomi di Indonesia. Pada ini tepat karena sampai dengan Agustus 2024 terdapat 7,47 juta pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%. Persentase sarjana pengangguran (lulusan D4, S1, S2, dan S3) meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, naik 4,4 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Inilah yang menimbulkan kekusaran pemerintah.

Kedua, anggaran harus mendukung kedaulatan pangan dan energi. Dua hal

ini bila tidak segera diantisipasi, maka tidak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi kerawanan pangan. Pelarangan impor bahan pangan terus dilakukan agar Indonesia terpacu untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah potensi besar untuk menuju swasembada. Begitu juga ekspor bahan pangan utama, berupa beras harus dibatasi dan bila perlu dilarang karena volatilitas produksi dan harga sangat rentan mengguncang kelompok masyarakat prasejahtera yang rentan pangan. Begitupula kedaulatan energi yang selama ini masih tergantung pada energi fosil yang terus berkurang dan mulai ditinggalkan masyarakat dunia.

Terakhir, pengunaan anggaran ditujukan untuk kemajuan teknologi untuk mendorong kemajuan Indonesia. Inovasi dan kreativitas, mutlak diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, melalui penurunan biaya produksi dan efisiensi lain. Ending dari semua ini harapan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Memang

agak sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sampai tahun 2029 dengan mengingat kondisi global yang kurang menguntungkan saat ini. Kita belum memiliki mesin pertumbuhan yang stabil untuk berkontribusi, sektor industri pun hanya mampu berkontribusi 3-4 persen. Dari mesin investasi, angka 1.800 triliun yang diharapkan terus naik secara eksponensial pun rasanya masih penuh tantangan yang tidak ringan, masih stagnan di US\$ 250 miliar/tahun.

Memberikan warning untuk anggaran terlarang memang baik dilakukan, tapi perhitungan pula dampak yang ditimbulkan agar perekonomian bergerak dengan stabil dan inklusif. Efek multipliet dari setiap pengetatan anggaran pasti ada, misalnya stagnasi pada kontribusi sektor akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, keberlanjutan UMKM, dan ini perlu perhitungan cermat dan bijak.

✎ -d
(Penulis, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI dan Kafegama DIY, Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting)